

Daftar Pustaka

Referensi Buku

- Agung. Mulyo. 2007. *Perpajakan Indonesia Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Dinamika Ilmu
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Amirullah. 2015. *Manajemen Strategi: Teori – Konsep – Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Azwar, Saifudin. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Cresswell. J. W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset :Memilih Diantara Lima Pendekatan ed, 3*. Diterjemahkan oleh : Lazuardi. L. A. Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar.
- David, Fred R., 2006. *Manajemen Strategis. Edisi Sepuluh*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Diana Anastasia dan Setiawati Lilis. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Halim, Abdul, dkk. 2016. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Herdiansyah. Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja rosdakarya Offset.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komikasi Kualitatif*. Yogyakarta : Lembaga Kajian Islam dan Sosial.
- Pongtiku.Rary. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Saja*. Jayapura: Nulis buku.com
- Restu Kartiko Widi. (2010), *Asas Metodologi Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Sukmadinata.Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Yani. Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Referensi Jurnal

Gunawan, Domai, dan Siswidiyanto. 2015. *Analisis Tunggal Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal. Malang : Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Rahmawati. 2014. *Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang*. Jurnal. Serang.

Novianti. Rizka. 2013. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal. Malang : Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Wulansepty, Dinar Ratna. 2014. *Strategi Pemungutan PBB Kota Surabaya Terhadap Realisasi Target Penerimaan Tahun 2009-2012*. Jurnal. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).

Referensi Media Online

Purnomo, Slamet Hadi. 2016. *DPPK Surabaya Kenalkan Aplikasi Pembayaran Pajak Online*. Diakses pada 05 Januari 2017 dari <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/dppk-surabaya-kenalkan-aplikasi-pembayaran-pajak-online>.

Anonim. 2011. *Komisi B DPRD Surabaya Minta DPPK Tingkatkan Layanan PBB Dan BPHTB*. Diakses pada 15 November 2016 dari http://www.surabayakita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2519&catid=3.

Anonim. 2015. *Pengertian Pajak Bumi Bangunan (PBB) Dasar Hukum Cara Mendaftarkan dan Pembayaran*. Diakses pada 02 Februari 2017 dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb.html>.

Anonim. 2015. *Definisi dan Pengertian Pajak Daerah*. Diakses pada 05 Februari 2017 dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pajak-daerah.html>.

Anonim. 2016. *Gambaran Umum Kondisi Daerah Surabaya*. Diakses pada 05 Februari 2017 dari http://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/files/doc_765.pdf.

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan pasal 23 ayat 2. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan No. 19 Tahun 2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi Bangunan.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.